

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RANCANGAN AKHIR RENSTRA BPBD KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025-2029

JL. LETJEND SUTOYO NO. 71

EMAIL: BPBD@PONTIANAK.GO.ID
INSTAGRAM : [@BPBD_PONTIANAK](https://www.instagram.com/BPBD_PONTIANAK)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ijin-Nyalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak Periode 2025 – 2029 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RENSTRA ini memuat tujuan, sasaran-sasaran strategis serta kebijakan-kebijakan yang akan diwujudkan dan dituangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dan peran serta seluruh lapisan masyarakat serta sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting untuk mendukung terwujudnya program dan kegiatan yang disusun dalam RENSTRA ini, dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan hambatan/kendala yang akan timbul/terjadi.

Dengan telah disusunnya RENSTRA ini, semoga dapat menjadi pedoman bagi segenap ASN di jajaran BPBD Kota Pontianak dalam rangka menunjang serta mendukung efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu juga diharapkan RENSTRA ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak secara efektif dan efisien.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

 I.1 Latar Belakang I-1

 I.2 Dasar Hukum I-2

 I.3 Maksud dan Tujuan I-6

 I.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-1

 II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur II-1

 II.2 Sumber Daya II-2

 A. Sumber Daya Manusia II-2

 B. Sarana dan Prasarana II-4

 C. Sumber Daya Keuangan II-6

 II.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah II-7

 A. Pengukuran Kinerja..... II-7

 II.4 Kelompok Sasaran Layanan..... II-38

 II.5 Permasalahan Pelayanan II-39

 II.6 Penentuan Isu Strategis II-40

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN II-1

 III.1 Tujuan dan Sasaran III-1

 III.2 Strategi dan Arah Kebijakan III-3

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

 IV.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... IV-1

 IV.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Wajib Pelanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban..... IV-51

BAB V PENUTUP..... V-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Renstra menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra BPBD Kota Pontianak menjadi pedoman dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan

KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di BPBD Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra BPBD Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. poin KEDUA b..
2. Surat edaran walikota Pontianak Nomor 25 tahun 2005 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Adanya perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2024 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kota Pontianak untuk lima tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2025-2029.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

I.3 Maksud dan Tujuan

Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk RPJMD agar penyelenggaraan urusan BPBD berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2024, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2024, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum pelayanan perangkat daerah yang mencakup capaian kinerja 5 tahun terakhir, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, serta permasalahan dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, strategi, penahapan renstra dan arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang target dan pembagian pagu program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2030

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, dan selanjutnya disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana dalam Perubahan Ketiga ini BPBD Kota Pontianak mendapat rekomendasi perubahan klasifikasi tipologi A dengan perubahan struktur organisasi yang tadinya hanya memiliki 2 Bidang yaitu Bidang Sekretariat dan Bidang Penanggulangan Bencana menjadi 4 Bidang dengan 1 bidang sekretariat dan Pemecahan Bidang Penanggulangan bencana menjadi 2 Bidang dan mengembalikan Bidang Pemadam Kebakaran yang sebelumnya ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali ke BPBD.

Adapun terkait kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 Sebagaimana tertera dalam Peraturan Walikota tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas BPBD Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

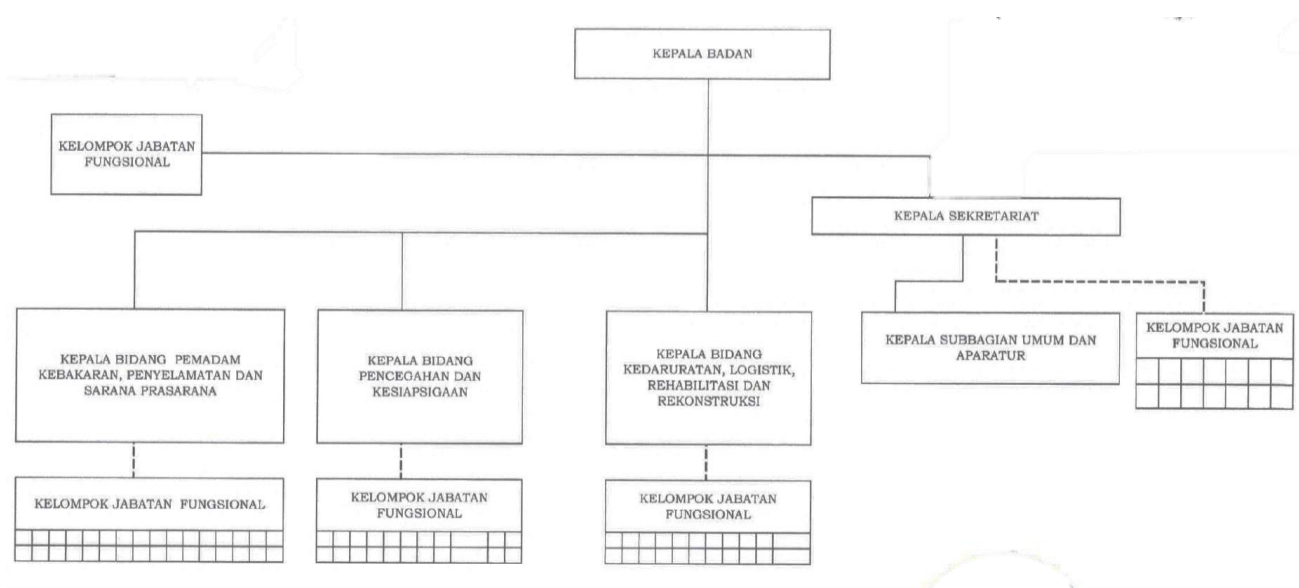
Sementara Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Kepala Sekretariat;
 - i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- d. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA PONTIANAK



II.2 Sumber Daya

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BPBD Kota Pontianak memerlukan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya berupa sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. BPBD Kota Pontianak masih memerlukan Personil Kepegawaian serta perlengkapan sarana dan prasarana secara cukup dan memadai dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Adapun kondisi SDM yang tersedia saat ini yaitu:

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan sebuah organisasi.Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2024 BPBD Kota Pontianak didukung oleh 17 orang ASN dan 2 orang tenaga kontrak atau jasa orang perorangan. Dari 17 orang ASN tersebut terdiri dari 11 orang ASN dengan jenis kelamin laki-laki dan 6 orang ASN dengan jenis kelamin perempuan.

Table II.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-
3.	Pembina (IV/a)	1	-	1
4.	Penata Tk.I (III/d)	4	1	5
5.	Penata (III/c)	-	2	3
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	2	4
7.	Penata Muda (III/a)	2	1	3
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	1	-	1
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	TOTAL	11	6	17

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2024

Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai/ ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah lulusan S2 sebanyak 3 orang, lulusan S1 sebanyak 10 orang, lulusan diploma sebanyak 2 orang untuk ASN dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 2 orang.

Table II.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah PNS						Total
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-	-	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembina (IV/a)	1	-	-	-	-	-	1
4.	Penata Tk.I (III/d)	-	5	-	-	-	-	5
5.	Penata (III/c)	1	1	-	-	-	-	2
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	2	2	-	-	-	4
7.	Penata Muda (III/a)	-	2	-	1	-	-	3
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	1	-	-	1
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3	10	2	2	0	0	17

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2024

Dalam rangka melaksanakan tugasnya BPBD Kota Pontianak juga memiliki Anggota Relawan Penanggulangan Bencana sebanyak 25 orang yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Pontianak setiap tahunnya. Selain itu dengan adanya perubahan SOTK baru yaitu berpindahnya Bidang Pemadam Kebakaran dari Satpol PP ke BPBD juga menambah dukungan personil di BPBD Kota Pontianak.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsinya BPBD Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran dan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada saat ini meliputi :

a. Gedung Kantor

Sejak Januari 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menempati bangunan di Jl. Letjen Sutoyo No. 71 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia sesuai dengan fungsinya, yaitu :

- 1) Mobil operasional Kepala Pelaksana jenis mini bus APV tahun 2007 sejumlah 1 unit dalam kondisi baik;
- 2) Mobil operasional lapangan (mobil komando) penanggulangan bencana, jenis pick up Ford Ranger double cabin tahun 2007, dalam kondisi baik;
- 3) Mobil operasional lapangan jenis pick up tahun 2021, dalam kondisi baik;
- 4) Sepeda motor operasional sekretariat sejumlah 1 unit dalam kondisi baik
- 5) Sepeda motor operasional lapangan penanggulangan bencana jenis trail sejumlah 2 unit dan sebanyak 1 unit jenis sport (mega pro) dalam kondisi baik.
- 6) Sebanyak 2 Unit Perahu Polyethylene lengkap dengan mesin perahu kap 9,8 PK dan perlengkapannya dalam kondisi baik
- 7) Mobil Pemadam Kebakaran (Jenis Truck Roda 6) sejumlah 2 unit dalam kondisi baik namun perlu pemeliharaan lebih rutin karna mobil ini merupakan Hibah sejak tahun 1997.
- 8) Mobil Pemadam Kebakaran (Roda 4) sejumlah 2 unit, yaitu Isuzu Fire Jeep dan Toyota Kijang Pick Up dalam kondisi baik.
- 9) Sepeda Motor Operasional untuk petugas Damkar sejumlah 2 unit dalam kondisi baik.

c. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin APBD Kota Pontianak

Tabel II.4

Daftar Inventaris dan Peralatan Kantor

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Komputer/PC	16	14	1	1
2.	Laptop	12	5	3	4
3.	Printer	29	17		12
4.	Telephone	1	1		
5.	Interphone antar ruangan	8	8		
6.	AC Split	15	15		
7.	Kursi	105	99		6
8.	Meja	44	44		
9.	Televisi	3	3		
10.	Infocus	2	1		1
11.	Jaringan Internet	1	1		
12.	Kamera	2	2		
13.	Handy Cam	1			1
14.	Sound System Set	1	1		

d. Peralatan Penanggulangan Bencana

BPBD Kota Pontianak memiliki beberapa peralatan penanggulangan bencana, seperti peralatan pemadaman karhutla, peralatan pertolongan di air, tenda dan lain-lain bersumber dari Hibah BNPB dan APBD Kota Pontianak.

Tabel II.5

Daftar Peralatan Penanggulangan Bencana

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Mesin Pompa Karhutla	2	1	1	
2.	Mesin Pompa Apung	2	2		
3.	Carry Bag	2	2		
4.	Chainsaw	3	3		
5.	Selang Pemadam Kebakaran	43	27		16
6.	Connector Selang	6	6		
7.	Nozel	4	4		
8.	Genset	2	2		
9.	Handy Talky	22	13		9
10.	Helm	26	26		26
11.	Head Lamp	5	5		
12.	Masker Full Face	10	10		
13.	Lampu Senter HIID Search Light	1	1		
14.	Sprayer	10	10		

15.	Sepatu Pengaman	50	30		20
16.	Tangki Air (2000L)	1	1		
17.	Tenda Posko	1	1		
18.	Tenda Keluarga	5	5		
19.	Tenda Pleton	2	2		
20.	Tenda Regu	3	3		
21.	Velbed	10	10		
22.	Tripod Rescue (500kg)	1	1		
23.	Pulley Rescue	4	4		
24.	Ascender	2	2		
25.	Discender	2	2		
26.	Tali Kuralon	2	2		
27.	Carabiner	16	16		
28.	Figur Eight	16	16		
29.	Caramantel Dynamic	4	4		
30.	Caramantel Rope	2	2		
31.	Hand Pallet	2	2		
32.	GPS	1	1		
33.	Basket Stretcher	1	1		
34.	Boneka Manekin	1	1		
35.	Webbing	26	26		

- e. Peralatan Pemadam Kebakaran
- Perpindahan Aset Damkar ke BPBD Kota Pontianak dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/000.2.5/BAST/SATPOLPP/2025 pada tanggal 22 April 2025 dengan total 199 item sebagian besar dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan.

C. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah ketersediaan sumber daya keuangan yang dimiliki. Untuk tahun 2024 jumlah anggarannya adalah Rp. 5.580.678.427,- (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) terdiri dari :

- Belanja Pegawai = Rp. 3.149.618.427,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
- Belanja Barang dan Jasa = Rp.2.057.704.900,- (Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

- Belanja Modal = Rp. 373.355.100,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah)

II.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah. Untuk menilai kinerja BPBD Kota Pontianak dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja dan melalui Akuntabilitas Keuangan pada tahun sebelumnya.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Capaian Tujuan Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,50	0,55	110%

Sumber : Data IKD BNPB

Dari tabel diatas Capaian Tujuan Strategis BPBD Kota Pontianak yang juga merupakan salah satu Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, tercermin dengan pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah. Dimana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap kemampuannya dalam menghadapi bencana, dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu Indeks Ketahanan, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten / kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk tahun 2023 realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak adalah 0,43. Dengan kata lain Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “Sedang”, dimana semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Realisasi nilai IKD Kota Pontianak Tahun 2024 meningkat pesat sebesar 0,55 lebih tinggi dari nilai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yakni sebesar 0,50 sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak adalah **“Sangat Berhasil”**, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **110%**.

Sementara itu, untuk capaian Strategis BPBD Kota Pontianak dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II.7
Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	44.12%	63,97%	145%

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2024

Dari tabel diatas Sasaran BPBD Kota Pontianak adalah Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD dengan target 44,12%. Sasaran ini merupakan turunan dari Nilai IKD yang berhasil di capai Kota Pontianak. Perhitungan ini dilakukan dengan cara memfilter dari 71 Indikator Ketahanan Daerah yang dikeluarkan oleh BNPB, BPBD Kota Pontianak menentukan 34 dari 71 Indikator tersebut akan direalisasikan dalam

kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tertera dalam target sasaran kinerja RENSTRA 2024-2026. Masing-masing indikator memiliki 4 level pertanyaan yang harus dijawab dan dilampirkan bukti dukungannya. Total pertanyaan dari 71 indikator IKD adalah 284 pertanyaan sehingga dengan target 34 indikator, BPBD Kota Pontianak hanya perlu menjawab 136 pertanyaan dalam kuesioner IKD yang dikeluarkan oleh BNPB. Hal ini dilakukan agar BPBD Kota Pontianak fokus dalam pelaksanaan kinerjanya.

Penetapan 34 indikator tersebut berdasarkan kemampuan BPBD Kota Pontianak dalam melaksanakan sasaran dari masing-masing prioritas. Sasaran masing-masing prioritas dapat diterjemahkan kedalam bentuk kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Sedangkan ke 37 indikator lainnya tidak ditetapkan sebagai sasaran strategis BPBD Kota Pontianak, dikarenakan perbedaan jenis ancaman bencana sehingga tidak relevan jika diterapkan di Kota Pontianak.

Persentase 34 indikator IKD dengan target 44,12% dan realisasi 63,97% pada tahun 2024 berarti BPBD Kota Pontianak telah melaksanakan perhitungan nilai IKD dan mencapai nilai indeks 0,55 yang artinya 87 dari 136 pertanyaan berhasil dijawab sehingga hasil realisasinya adalah 63,97%, (87 dari 136).

Realisasi capaian kinerja indikator ini berada diangka 63,97% sementara tergetnya adalah 44,12% sehingga realisasi ini sudah melebihi target dengan persentase capaian kinerja 145% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Adapun program yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan rincian kegiatan :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Penyusunan Rencana Kontijensi

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota
 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Sementara itu, analisis penyebab peningkatan capaian kinerja dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.8

Tabel Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

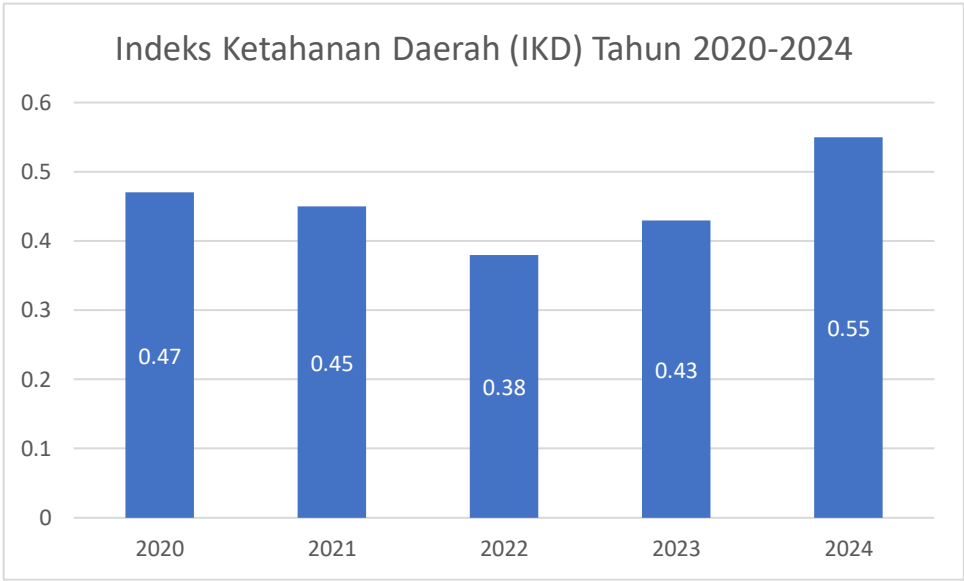
No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan Strategis: Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan	➤ Tingginya partipasi Instansi terkait akan nilai IKD Kota Pontianak	➤ Perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana. ➤ Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait penanggulangan bencana, terutama untuk mendapatkan data dukung untuk meningkatkan nilai IKD;
1.1	Sasaran Srategis: Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	Peningkatan	➤ Adanya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan perhitungan dan pemenuhan indikator IKD	➤ Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan FGD dengan anggaran yang ada untuk peningkatan nilai IKD.

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2024

Adapun nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar II.9

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis di Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Sebelumnya



Sumber : Buku IRBI BNPB 2024

Dalam 5 tahun terakhir nilai Indeks Ketahanan Daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun selalu berada dalam kategori sedang tapi di akhir tahun 2024 nilai IKD ternyata meningkat dalam 2 tahun terakhir dan naik cukup tinggi dari capaian tahun sebelumnya 0,43 menjadi 0,55. Peningkatan ini merupakan bukti komitmen BPBD Kota Pontianak dalam meningkatkan Ketahanan Kota Pontianak dalam urusan penanggulangan bencana.

Sementara untuk perbandingan capaian indikator sasaran strategis yaitu Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD cukup sulit jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, karna pada tahun 2020 dan 2021 BPBD Kota Pontianak tidak melakukan perhitungan terhadap IKD sehingga tidak ada nilai IKD yang terkumpul pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan refi **TAHUN** ggaran dalam penanganan Covid-19 sehingga angka IKD cenderung tidak berubah/meningkat. IKD terdiri dari 7 Prioritas yang dijabarkan menjadi 71 Indikator dan masing-masing indikator tersebut memiliki 4 pertanyaan yang harus di penuhi. Dimana penilaian IKD ini menggunakan *tool excel* yang dimana masing-masing pertanyaan tersebut dapat dijawab dan dilampirkan bukti dukungannya. Nantinya BPBD masing-masing Kab/Kota akan mengumpulkan data tersebut ke dalam InaRISK dan melaporkannya ke BPBD Provinsi untuk di verifikasi oleh BNPB secara kolektif.

Sementara itu, capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pontianak

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Presentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi					100%	100%	100%			100%	100%	100%	-		1	1	1	-
	Tingkat Waktu Tanggap (repsn time) penanggulangan Bencana								100%					100%					1
	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								100%					100%					1
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			√		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		1	1	1	1
	Presentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			√		100%	-	1 dokumen			0%	-	1 dokumen	-		0	-	1	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			√				50 orang	250 orang				50 orang	250 orang				1	1
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			√		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%			1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Becnana yang Dilegalisasi			√		-		1 dokum en	1 dokume n		-	-	0 dokume n	1 dokum en		-	-	0	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase warga negara yang ikut pelatihan			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			√				50 orang	80 orang				50 orang	77 orang				1	0,96
	Presentase warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			√		100%	100%				100%	0%				1	0		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			√				1 dokum en	12 dok				1 dokume n	0 dok				1	0
	Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			√		100%	100%				100%	100%				1	1		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			√				2 unit	75 unit				2 unit	75 unit				1	1
	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk					1 Kelurahan	5 Kelurahan				1 Kelurahan	5 Kelurahan				1	1		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							1 kawasan	3 kawasan				1 kawasan	3 kawasan				1	1
	Jumlah sekolah tangga bencana yang terbentuk					1 Sekolah	1 Sekolah				1 Sekolah	1 Sekolah				1	1		
	Presentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			√				1 dokum en	1 dok				1 dokume n	0 dok				1	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			√				50 orang	200 orang				132 orang	200 orang				2,64	1
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			√		100%	100%	100%	100%		100%	100%							
	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat							1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	0 dok				1	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Presentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			√				27 orang	200 orang				12 orang	243 orang				0.44	1.22
	Presentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik					100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							55 orang	275 orang				91 orang	241 orang					0.88

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana			√		100%	100%				100%	100%				1	1		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			√				1 dokum en	1 dokume n				1 dokume n	0 dok				1	0
	Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara Penanggulangan Bencana yang di buat								100%					100%					1
	Presentase SOP yang dibuat					100%	100%	100%			100%	100%	100%			1	1	1	
	Jumlah SOP yang dibuat					2 SOP	2 SOP				2 SOP	2 SOP				1	1		
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah							1 Dokum en	1 Dokum en				1 Dokume n	1 Dokum en				1	1
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana								1 Dokum en					1 Dokum en					
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan								1 Dokum en					1 Dokum en					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								1 Dokumen					1 Dokumen					1
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P								1 Dokumen					1 Dokumen					1
	Presentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		1	1	1	1
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah					25 dokumen/laporan	25 dokumen/laporan	14 dokumen/laporan	-		25 dokumen/laporan	25 dokumen/laporan	14 dokumen/laporan	-		1	1	1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	100%				-	100%					1
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan	6 dokumen	6 dokumen		9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan	6 dokumen	6 dokumen		1	1	1	1
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah					7 dokumen/laporan	7 dokumen/laporan	4 laporan	3 laporan		7 dokumen/laporan	7 dokumen/laporan	4 laporan	3 laporan		1	1	1	1
	Jumlah laoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun					9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan	4 laporan	3 laporan		9 dokumen/laporan	9 dokumen/laporan	4 laporan	3 laporan		1	1	1	1
	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah								100%					100%					1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah					12 bulan	12 bulan	12 bulan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	-		1	1		
	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN					12 bulan	12 bulan	17 orang/bulan	21 orang/bulan		12 bulan	12 bulan	17 orang/bulan	21 orang/bulan		1	1		1
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan					1
	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen		12 bulan	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen		1	1		1
	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100%					100%					1
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya					21 orang	18 orang	19 orang			21 orang	20 orang	19 orang			1	1	1	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya					46 Stell	38 Stell	1 paket	1 paket		46 Stell	38 Stell	1 paket	1 paket		1	1	1	1
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal					2 orang	4 orang	1 orang	5 orang		2 orang	3 orang	1 orang	5 orang		1	1	1	1
	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah								100%					100%					1
	Jangka waktu Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah					12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan			1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					13 unit	12 unit	1 paket	2 paket		13 unit	12 unit	1 paket	2 paket		1	1	1	1
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket		12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket		1	1	1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket		12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket		1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 bulan	12 bulan	48 dokumen	48 dokumen		12 bulan	12 bulan	48 dokumen	48 dokumen		1	1	1	1
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket		12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket		1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 bulan	12 bulan	1 laporan	7 laporan		12 bulan	12 bulan	1 laporan	7 laporan		1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							11 dokumen	12 dokumen				11 dokumen	12 dokumen				1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%					100%					1
	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan			1	1	1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan		12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan		1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan		12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan		1	1	1	1
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%					100%					1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara					48 unit	48 unit	52 unit			48 unit	60 unit	52 unit			1	1	1	
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					39 unit	37 unit	42 unit	42 unit		39 unit	37 unit	42 unit	42 unit		1	1	1	1
	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara					7 unit	9 unit	9 unit	9 unit		7 unit	9 unit	9 unit	9 unit		1	1	1	1
	Jumlah gedung kantor dan bangun lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1	1	1	1
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					-	1 unit	-	-		-	1 unit	-	-		-	1	-	-

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 4.931.806.050 persentase sebesar 88,37 % dari target sebesar Rp. 5.580.678.427. Pos belanja ini terdiri dari :

Tabel II.11
Alokasi Belanja Daerah BPBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	BELANJA OPERASI	
	- Belanja Pegawai	3.149.618.427,00
	- Belanja Barang dan jasa	2.057.704.900,00
2.	BELANJA MODAL	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.355.100,00
	- Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00
	Surplus(Defisit)	5.580.678.427,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, mengalami kenaikan, ini dikarenakan pada Tahun 2024 masih adanya kejadian KARHUTLA di mana terdapat penambahan anggaran pada beberapa kegiatan.

Tabel. II.12
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 BPBD Kota Pontianak

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	BELANJA OPERASI			
	- Belanja Pegawai	3.149.618.427,00	3.005.900.016,00	95,44
	- Belanja Barang dan jasa	2.057.704.900,00	1.630.997.634,00	79,26
2.	BELANJA MODAL			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.355.100,00	145.058.400,00	97,78
	- Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00	149.840.000	66,60
	Surplus (Defisit)	5.580.678.427,00	4.931.806.050,00	88,37

TABEL II.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	7	13	14	15	16	17	18	19
	Program Penanggulangan Bencana		655,833,203	998,069,000	1,373,662,900	1,497,140,400		558,105,776	875,355,350	930,764,620	1,076,078,295		0.851	0.877	0.678	0.719	32.93	21.06
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		24,244,825	44,329,800	141,184,900	62,439,600		22,450,000	44,185,000	121,312,000	34,944,830		0.926	0.997	0.859	0.560	81.85	90.46
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		0	0	130,222,100	62,439,600		0	0	110,562,000	34,944,830		0.000	0.000	0.849	0.560	-52.05	0.00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		24,244,825	44,329,800	10,962,800	0		22,450,000	44,185,000	10,750,000	0		0.926	0.997	0.981	#DIV/0!	-30.81	7.05

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		98,910,428	216,878,100	188,808,800	562,648,600		22,450,000	237458200	180,379,900	428,380,700		0.227	0.000	0.955	0.761	101.44	311.23
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		0	0	2,750,000	176,302,000		0	0	2,750,000	156,333,400		0.000	0.000	1.000	0.887	6310.98	5584.85
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		0	59,102,300	19,962,800	23,853,000		0	57,055,000	19,562,500	23,213,000		0.000	0.965	0.980	0.973	-23.37	-32.86
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		24,357,550	82,953,450	50,185,000	5,400,000		24,352,032	74,096,000	46,030,000	0		1.000	0.893	0.917	0.000	37.27	55.46

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	19,800,000	21,690,000	91,549,700		0	13,841,800	21,670,000	89,160,000		0.000	0.699	0.999	0.974	165.81	28.28
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		40,909,700	56,486,500	13,162,800	50,021,000		40,909,700	53,411,200	13,037,500	46,954,000		1.000	0.946	0.990	0.939	80.47	-15.01
	Penyusunan Rencana Kontijensi		16,618,392	11,470,650	21,205,800	98,314,000		14,027,672	11,344,200	21,193,000	0		0.844	0.989	0.999	0.000	139.17	22.56
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		17,024,786	32,065,200	59,852,400	45,684,000		15,302,572	27,710,000	56,136,900	45,184,000		0.899	0.864	0.938	0.989	50.44	61.22
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					71,524,900					67,536,300				#DIV/0 !	0.944	0.00	0.00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		532,677,950	691861100	1,041,139,200	839,737,200		441,063,800	593712150	626,597,720	603,633,640		0.828	0.858	0.602	0.719	20.34	13.38

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		0	0	0			0	0				0.000	0.000			0.00	0.00
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		189,648,200	236,880,200	250,696,000	332,680,800		154,646,000	223590000	237430000	312,670,800		0.815	0.944	0.947	0.940	21.15	16.92
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		269,108,000	270,430,000	657,047,200	416,118,900		216,633,000	225290000	326,190,800	221,784,440		0.805	0.833	0.496	0.533	35.60	16.26
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		73,921,750	144,832,150	130926000	91,687,500		69,784,800	144832152	61,601,920	69,178,400		0.944	1.000	0.471	0.755	18.78	16.69
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0	0	2,470,000	9,250,000		0	0	1,375,000	0		0.000	0.000	0.557	0.000	274.49	-100.00

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	0	2,530,000	32,315,000		0	0	2,475,000	9,119,125		0.000	0.000	0.978	0.282	1177.27	268.45
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana		0	0	2,530,000	6,000,000		0	0	2,475,000	39,550,000		0.000	0.000	0.978	6.592	137.15	1497.98
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3,294,672,554	3,867,808,371	3,480,161,574	4,083,538,027		3133935929	3469679957	3,169,706,020	3,855,727,755		0.951	0.897	0.911	0.944	8.24	0.69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11,675,023	34,204,700	33,961,500	37,767,000		11,215,191	27,039,800	30,205,300	36,259,800		0.961	0.791	0.889	0.960	67.82	50.94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,649,823	7,750,100	5,339,000	9,151,000		4,572,563	6,796,800	5,179,600	8,675,800		0.983	0.877	0.970	0.948	35.65	8.28
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3,490,300	20,819,900	24,302,000	24,582,000		3,272,468	17,693,500	20,955,700	23,582,000		0.938	0.850	0.862	0.959	171.46	153.04

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3,534,900	5,634,700	4,590,500	4,034,000		3,370,160	2,549,500	4,070,000	4,002,000		0.953	0.452	0.887	0.992	9.58	11.76
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,707,633,501	2,727,938,730	2,767,690,222	3,151,296,927		2570038573	2525589217	2,503,138,621	3,007,578,516		0.949	0.926	0.904	0.954	5.36	-0.87
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		2,704,633,501	2724938730	2,606,096,722	2,983,178,427		2567250348	2525589217	2,352,365,621	2,839,460,016		0.949	0.927	0.903	0.952	3.62	-2.83
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		3,604,820	3,603,120	2,413,500	166,440,000		2,788,225	1,500,000	2,263,000	166,440,000		0.773	0.416	0.938	1.000	2254.38	1.56
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0	159,180,000	1,678,500		0	0	148,510,000	1,678,500		0.000	0.000	0.933	1.000	-98.95	-98.87
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		28,507,300	78,169,000	27,108,683	79,668,000		28,507,300	28,507,300	26,938,683	73,721,788		1.000	0.365	0.994	0.925	100.92	-1.83

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		28,507,300	24,210,000	12,990,000	28,100,000		28,507,300	23,910,000	12,820,000	28,100,000		1.000	0.988	0.987	1.000	18.30	-20.84
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0	53,959,000	14,118,683	51,568,000		0	19,794,800	14,118,683	45,621,788		0.000	0.367	1.000	0.885	95.71	-14.34
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		87,743,957	410361146	345,220,171	450,421,600		87427301	283728301	313,287	392,570,535		0.996	0.691	0.001	0.872	127.43	41.68
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		3,179,947	3,439,758	4,679,125	5,550,000		3,146,736	3,264,429	4,679,125	5,533,800		0.990	0.949	1.000	0.997	20.94	15.69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		39,085,342	99,151,423	110,194,050	117,178,400		38,928,315	98,249,542	106,754,700	114,829,800		0.996	0.991	0.969	0.980	57.05	53.68
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17,700,000	26,850,000	27,500,000	33,000,000		17,675,000	26,450,000	27,280,000	32,540,000		0.999	0.985	0.992	0.986	24.71	17.59
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan		18,768,668	29,780,938	28,972,300	35,601,200		18,667,250	29,742,306	27,266,500	35,322,400		0.995	0.999	0.941	0.992	26.28	17.00

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		4,000,000	5,000,000	5,000,000	11,000,000		4,000,000	5,000,000	4,700,000	9,200,000		1.000	1.000	0.940	0.836	48.33	6.33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5,010,000	246,139,000	94,524,696	164,392,000		5,010,000	121022024	69,912,597	114,344,535		1.000	0.492	0.740	0.696	1608.42	757.79
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	74,350,000	83,700,000		0	0	72,750,000	80,800,000		0.000	0.000	0.978	0.965	12.58	11.07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		295,100,490	304,910,091	153,495,774	163,339,448		278,370,344	288934057	144,290,447	157,749,705		0.943	0.948	0.940	0.966	-13.31	-15.42
	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		69,830,816	76,223,091	74,217,934	76,018,000		54,415,047	60,338,807	650,412,607	73,658,537		0.779	0.792	8.764	0.969	2.98	329.61
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		225,269,674	228687000	79,277,840	87,321,448		223,955,297	228595250	79,277,840	84,091,168		0.994	1.000	1.000	0.963	-17.89	-21.08

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164,012,283	312,224,704	152,685,224	201,045,052		158,377,220	300683782	151,845,522	187,847,411		0.966	0.963	0.995	0.934	23.65	13.45
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		115,228,283	166,800,204	102,460,000	114,540,052		114,102,420	161730950	102,044,322	105,584,679		0.990	0.970	0.996	0.922	5.99	1.61
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		48,784,000	115,650,000	40,840,000	51,330,000		44,274,800	109464142	40,600,000	47,326,732		0.908	0.947	0.994	0.922	32.69	28.11
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9,849,000	9,385,224	35,175,000		0	9,563,190	9,201,200	34,936,000		0.000	0.971	0.980	0.993	135.04	-1.89

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	19,925,500	0	0		0	19925500	0	0		0.000	1.000	0.000	0.000	0.00	0.00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak mempunyai 2 program, di mana dari masing-masing program tersebut terdapat 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Program-program APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan 20 Sub Kegiatan.
- b. Program Penanggulangan Bencana , terdiri dari 4 kegiatan 18 Sub Kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024, tanggal 27 September 2024, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor : 32 Tahun 2024, Tanggal 27 September 2024, sebesar Rp. 5.580.678.427,00. Dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan misi yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan- kegiatan berupa:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp.37.767.000,00. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan terselesaikan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.259.800,00 Presentase tingkat capaian kinerja 96,01 %.
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp. 3.151.296.927,00. Indikator kegiatan adalah administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan realisasi anggaran sebesar 3.007.578.516,00 Presentase tingkat capaian kinerja 95,44 %.
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp. 79.668.000,00. Indikator kegiatan adalah jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya realisasi anggaran sebesar 73.721.788,00 Presentase tingkat capaian kinerja 92,54%.
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp.450.421.600,00. Indikator kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor realisasi anggaran sebesar Rp. 392.570.535,00 Presentase tingkat capaian kinerja 87,16 %.
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebesar Rp.163.339.448,00. Indikator kegiatan adalah jasa penunjang operasional kantor yang dibayarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 157.749.705,00 Presentase tingkat capaian kinerja 96,58 %.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebesar Rp.201.045.052,00. Indikator kegiatan adalah jumlah barang milik daerah yang tercatat dan dipelihara realisasi anggaran sebesar Rp. 187.847.411,00 Presentase tingkat capaian kinerja 93,44 %.
- b Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan- kegiatan:
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp.62.439.600,00 Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi dan edukasi bencana, khususnya di wilayah rawan bencana realisasi anggaran sebesar Rp. 34.944.830,00 Presentase tingkat capaian kinerja 55,97 %.
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dialokasikan sebesar Rp.562.648.600,00. Indikator kegiatan adalah jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dibagi jumlah WNI yang berada di wilayah rawan bencana realisasi anggaran sebesar Rp. 428.380.700,00 Presentase tingkat capaian kinerja 76,14 %.
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dialokasikan sebesar Rp.839.737.200,00. Indikator kegiatan adalah Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dibagi dengan warga negara yang menjadi korban bencana, dikali 100% realisasi anggaran sebesar Rp. 603.633.640,00 Presentase tingkat capaian kinerja 71,88%.
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dialokasikan sebesar Rp.32.315.000,00. Indikator kegiatan adalah Jumlah Penyelesaian Dokumen kebencanaan, realisasi anggaran sebesar Rp. 9.119.125,00 Presentase tingkat capaian kinerja 28,22%.

II.4 Kelompok Sasaran Layanan

BPBD Kota Pontianak melakukan pelayanan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yakni Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Semua masyarakat Kota Pontianak berhak mendapatkan layanan. Untuk Pelayanan Pra Bencana, BPBD Kota Pontianak mengkhususkan pada daerah-daerah yang rawan bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana. Untuk tahapan Tanggap Darurat Bencana, fokus layanan diberikan pada mereka yang mengalami musibah bencana melalui pemberian makanan siap saji dan bantuan logistik, kegiatan respon cepat bencana, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sedangkan pada tahapan

Pasca Bencana, penerima layanan difokuskan pada korban bencana yang mengalami kerusakan fisik bangunan hingga kerusakan sarana prasarana lainnya.

Dalam melakukan upaya penanggulangan bencana, BPBD Kota Pontianak banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik dari sesama instansi pemeritahan dibawah naungan Pemerintah Kota Pontianak sendiri maupun dari pihak luar, seperti TNI, POLRI, Manggala Agni, Basarnas, PMI, Pemadam Kebakaran Swasta yang bernaung di bawah Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta, juga dari lembaga sosial seperti Rumah Zakat. Saat berada di lokasi bencana, semua mitra saling bekerjasama bahu membahu mulai dari upaya penanggulangan bencana seperti pemadaman lahan yang terbakar, pencarian/evakuasi korban, maupun dari segi sosial seperti pemberian bantuan sosial pasca terjadinya bencana.

II.5 Permasalahan Pelayanan

Penjabaran permasalahan pelayanan dalam dokumen ini disusun berdasarkan capaian kinerja pelayanan dan juga Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Keseluruhan program kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%. Namun dengan adanya perubahan terkait SOTK baru, BPBD Kota Pontianak di tuntut untuk dapat memaksimalkan pelayanannya dan meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dpat disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Bencana memang merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi dengan pasti, sehingga perlu dilakkukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kejadian bencana. Dalam hal ini BPBD Kota Pontianak memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Pontianak diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat. Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kota Pontianak, diantaranya :

Tabel II.14
Permasalahan di Kota Pontianak terkait Kebencanaan

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	Perlu adanya peningkatan ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko,	1. Letak geografis Kota Pontianak membuat wilayah ini memiliki risiko bencana:
			a. Banjir, terutama di kawasan yang dekat dengan Sungai Kapuas

		mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	b. Kekeringan, dimana pada musim kemarau dan akan berpotensi lebih parah dengan adanya peningkatan suhu ekstrem dari perubahan iklim
			c. Kebakaran hutan dan lahan, risiko bencana lebih tinggi pada musim kemarau dan terutama pada lahan gambut
			d. Cuaca ekstrem/angin puting beliung, risiko bencana lebih tinggi pada transisi dua musim
			2. Adanya perubahan iklim (peningkatan suhu dan penurunan curah hujan) meningkatkan bahaya atau ancaman bencana hidrometeorologi, terutama kekeringan, cuaca ekstrem/angin puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan
			3. Penanggulangan bencana sedang dalam proses diarahkan agar terintegrasi dengan dimensi pembangunan, dimana kebencanaan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan
			4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana masih dalam proses diupayakan secara optimal
			5. Adanya risiko bencana banjir yang lebih tinggi pada masyarakat yang tinggal di rumah panggung di atas sungai, karena hal tersebut adalah kearifan lokal
			6. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kehadiran RTRW/RDTR Kota, sehingga masih ada pemanfaatan ruang yang kurang sesuai pada wilayah rawan bencana
			7. Belum optimalnya infrastruktur drainase untuk mencegah banjir karena sering tumpang tindih dengan infrastruktur lain seperti listrik, saluran air bersih, dan jalan

Sumber : RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

II.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang daerah di masa mendatang. Isu Strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun dapat berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat. Hal tersebut dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Pontianak. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan keputusan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan -tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan. Sebagai respon terhadap dinamik lingkungan strategis baik lokal,

regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Pontianak, dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu -isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

A. Isu Global

Dalam kancan global, Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Kerangka kerja Sendai (SFDRR) adalah kerangka kerja global yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan. Pada tahun 2030, seluruh negara yang berkomitmen terhadap SFDRR, diharapkan dapat memberikan kontribusi atas pencapaian 7 (tujuh) target SFDRR. SFDRR memiliki outcomes yaitu pengurangan secara substansial dari risiko dan kerugian akibat bencana menyangkut jiwa manusia, mata pencaharian dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan hidup manusia, dunia usaha, komunitas dan negara. Terdapat 7 (tujuh) target global SFDRR 2015-2030 sebagai berikut.

- a. Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
- b. Pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
- c. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.
- d. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting/kritis dan gangguan pelayanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- e. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.
- f. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
- g. Bertambahnya akses pada sistem peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian untuk masyarakat.

Untuk mencapai target global tersebut, ditetapkan 4 (empat) prioritas SFDRR, sebagai berikut:

- a. Pemahaman risiko bencana.
- b. Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana.
- c. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk tanggap bencana yang efektif dan untuk “membangun kembali lebih baik” dalam masa pemulihan pascabencana.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia juga telah

mengadopsi tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional sampai tahun 2030. Berdasarkan tujuh belas tujuan yang disepakati secara global, terdapat berbagai target SDGs yang terkait secara langsung dengan penanggulangan bencana tersebar pada 10 tujuan dalam skala global namun sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 berfokus pada Tujuan SGD's Tahun 2030 pada Tujuan 13, Sasaran 13.1.: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

B. Isu Nasional dan Isu Regional

Isu strategis penanggulangan bencana dirumuskan sebagai permasalahan yang telah teridentifikasi dan diprediksi akan terjadi dalam jangka menengah ke depan. Berikut Isu strategi penanggulangan bencana 2025-2029 yang merupakan hasil analisis antara Dokumen RENNAS PB Tahun 2025-2029 dan analisis Isu Daerah yang dihadapi di Kota Pontianak :

1. Meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi

Perubahan iklim global, didorong oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan peningkatan hari hujan lebat dan suhu udara rata-rata yang lebih tinggi. Fenomena La Nina dan El Nino menunjukkan variabilitas yang tinggi, berkontribusi pada cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Data menunjukkan peningkatan frekuensi curah hujan ekstrem, terutama di Kalimantan Barat dan Papua. Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan juga meningkat. Jenis ancaman bencana di wilayah Pulau Kalimantan terutama terdiri dari kebakaran hutan dan lahan, banjir dan kekeringan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam 10 tahun terakhir mengidentifikasi bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan dan banjir tercatat memiliki frekuensi yang tinggi. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia, meningkatkan penyakit yang ditularkan oleh vektor, air, dan makanan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menambah kerentanan terhadap bencana.

2. Perlunya pengelolaan dan perlindungan pada ekosistem lahan gambut

Kota Pontianak memiliki kondisi geologi yang unik. Kondisi Geologi di Kota Pontianak adalah berjenis Talus Deposit. Talus berarti pergeseran tanah atau semacam rayapan tanah dari atas ke bawah yang terjadi akibat gaya gravitasi,

sedangkan deposit berarti merupakan akumulasi atau kumpulan yang terjadi akibat penumpukan atau sedimentasi, sehingga dapat disimpulkan apabila talus deposit merupakan kumpulan tanah yang terbentuk akibat dari aktivitas sedimentasi. Endapan/sedimentasi disinyalir terjadi karena Kota Pontianak merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibagi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Selain itu, Kota Pontianak memiliki wilayah gambut dengan klasifikasi gambut berkanal (Zona Budidaya), kubah gabut berkanal (Zona Lindung), dan kubah gambut tidak berkanal (zona lindung). Secara alami, tumpukan material pada lahan gambut menyimpan air dalam jumlah besar karena sifatnya yang seperti spons dan dapat menyerap dan menahan air. Namun ketika kemarau tanah gambut akan menjadi kering dan mudah terbakar sehingga material organik tersebut berubah menjadi bahan bakar sehingga ketika terjadi kebakaran dipermukaan lahan gambut api akan menjalar secara lambat hingga kedalam tanah sehingga upaya pemadaman kebakaran dilahan gambut umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama hingga dalam hitungan hari. Kebakaran pada lahan gambut masih menjadi agenda tahunan di Indonesia. Dampaknya adalah merusak lingkungan, mengganggu kualitas air, mengancam habitat flora dan fauna hingga menimbulkan masalah pernapasan dan masalah kesehatan lainnya.

3. Belum efektifnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan

Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan, Upaya-upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana Pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di setiap tahapan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah penting dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan upaya tersebut dalam pengurangan risiko bencana. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya juga penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas upaya penanggulangan bencana. Pemantauan dan evaluasi, juga melingkupi pengawasan dan pelaporan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat terhadap seluruh penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengawasan dan pelaporan ini perlu untuk ditingkatkan dan dikelola dalam sistem informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan berkaitan bencana. Sistem informasi ini juga

dibutuhkan tidak hanya untuk menjadi sarana pelaporan hasil pengawasan pemerintah, tetapi juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam rencana penanggulangan bencana. Selain itu, sistem informasi ini juga perlu untuk dibangun dalam mengakomodasi pelaporan capaian sasaran-sasaran dalam komitmen global, pengembangan metadata indikator penanggulangan bencana, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan dan kontribusi pihak pemerintah.

4. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar stakeholder yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, media massa dan NGO

Tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia masih memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti: penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga; pemanfaatan teknologi, informasi, dan inovasi; pemberdayaan masyarakat; dan penguatan pendanaan. Transformasi tata kelola dalam penanggulangan bencana di Indonesia juga perlu didukung dengan kolaborasi multipihak di tingkat daerah, nasional, regional, maupun global. Kerjasama multipihak dalam bentuk kemitraan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, pendanaan, termasuk pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi multipihak juga perlu didorong untuk meningkatkan akses terhadap bantuan bencana dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun pihak lainnya.

5. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat

Data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi merupakan komoditas penting dalam tata kelola penanggulangan bencana ke depan. Indonesia telah mengimplementasikan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan data terpadu kebencanaan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Berbagai kebijakan di tingkat nasional dan sistem informasi teknologi juga telah tersedia di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana. Dalam jangka menengah ke depan pengelolaan data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi masih menjadi tantangan terutama untuk untuk

meningkatkan pemahaman risiko bencana dan pengambilan keputusan yang tepat. Persoalan dan tantangan terkait keterbukaan akses, integrasi data, interoperabilitas data, keamanan dan privasi, standardisasi data (ketersediaan dan kualitas data), serta peningkatan partisipasi para pihak masih dihadapi dan memerlukan solusi dalam jangka menengah ke depan.

6. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta sumber daya aparatur penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana merupakan salah satu aspek vital dalam menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Indonesia, termasuk sebagian besar wilayah di dalamnya, berada dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga kekeringan ekstrem. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana sangat menentukan tingkat kerentanan dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai. Banyak daerah belum memiliki fasilitas tanggap darurat yang lengkap, seperti posko bencana permanen, gudang logistik yang representatif, peralatan evakuasi, sistem komunikasi darurat, serta alat-alat berat untuk penanganan bencana seperti banjir atau tanah longsor. Selain itu, alat-alat yang tersedia sering kali sudah usang, tidak terawat dengan baik, atau bahkan tidak sesuai standar teknis yang dibutuhkan dalam situasi darurat. Akibatnya, respon awal terhadap bencana menjadi lambat dan tidak efektif, yang pada akhirnya dapat memperbesar skala dampak yang terjadi, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur penanggulangan bencana, juga menjadi isu yang krusial. BPBD di beberapa daerah masih belum memiliki struktur organisasi yang ideal, dengan jumlah personel yang terbatas dan belum semua memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan. Aparatur yang ada kerap kali merangkap tugas dengan fungsi lain, sehingga fokus terhadap kesiapsiagaan dan penanganan bencana menjadi kurang optimal. Belum lagi masalah rendahnya intensitas pelatihan dan simulasi, yang berdampak pada lemahnya kemampuan respons cepat dan koordinasi lintas sektor saat terjadi bencana. Kendala lain yang memperburuk kondisi ini adalah rendahnya alokasi anggaran daerah untuk kegiatan penanggulangan bencana. Banyak pemerintah daerah masih menempatkan urusan kebencanaan sebagai urusan sekunder, sehingga penganggaran untuk peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas aparatur sangat

terbatas. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat atau lembaga donor masih tinggi, padahal idealnya pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Kurangnya integrasi dan koordinasi antar-lembaga juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi darurat, koordinasi antara BPBD, dinas terkait, TNI/Polri, serta masyarakat relawan sering kali tidak berjalan efektif akibat minimnya latihan bersama dan lemahnya sistem komando yang terintegrasi. Hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana yang komprehensif, berbasis pada prinsip kolaboratif, partisipatif, dan berbasis risiko.

Tabel II.15

Permasalahan dan Isu Strategis Bencana di Kota Pontianak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terbentuknya Kelurahan Tanggap bencana	Perlu adanya peningkatan ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Penanggulangan risiko bencana dan perubahan iklim 2. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim 3. Pengelolaan Lingkungan Bekelanjutan 4. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan 5. Mitigasi terhadap perlindungan banjir 6. Perubahan iklim dan kerawanan bencana 7. Belum optimalnya penanganan risiko bencana (Indeks risiko bencana, lahan kritis)	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TBP 13 Penanganan Iklim.	Meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi		Meningkatnya intensitas kejadian bencana hidrometeorologi di Kota Pontianak (karhutla, banjir dan puting beliung)
			Perlu adanya kerja sama dengan dunia internasional terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut	Perlunya dukungan dari pusat terkait aturan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut	Perlu adanya kerjasama pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan gambut anatar daerah untuk menjaga kelestariannya	Perlunya upaya perbaikan atau restorasi lahan gambut dan pengawasan yang ketat terhadap penerapan RTRW Kota Pontianak.
			Menggabungkan strategi pencegahan risiko bencana ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030	Belum efektifnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan		Belum efektifnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan
			Peningkatan kemitraan kerjasama dalam pengurangan risiko bencana	Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar stakeholder yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, media massa dan NGO		Belum optimalnya kolaborasi multisektoral dalam pencegahan dan penanganan bencana
			Perlunya pengembangan teknologi peralatan yang canggih dalam mendeteksi bencana	Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat		Belum tersedianya suatu sistem yang dapat menyentuh seluruh lapisan masarakat baik dalam penyebaran informasi maupun sistem peringatan dini
				Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta sumber daya aparatur penanggulangan bencana		Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta sumber daya aparatur penanggulangan bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Tujuan Perangkat Daerah akan terwujud di tahun 2030. Tujuan Perangkat Daerah menggambarkan arah strategis organisasi, sehingga semua program dan kegiatan di Perangkat Daerah difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi.

Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Pontianak periode 2025 sd 2029 adalah **“MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS** Visi tersebut dapat di jelaskan dalam lima misi yang memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.
3. Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Melalui Penyediaan Insfratraktur Hijau.
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif,Stabil,Produktif,Kreatif,dan Inovatif.
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram dan Tertib Untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029, BPBD Kota Pontianak mengampu misi ke- 3 dan tujuan ke-2 Kota Pontianak yakni **Meningkatkan Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.** Untuk mencapai tujuan Kota tersebut BPBD mendukung sasaran ke-1 yaitu **Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana** yang dapat diukur dengan indikator **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** dengan target yang ditetapkan meningkat dari 0,55 pada akhir tahun 2024 menjadi 0,70 di akhir tahun capaian Rensta tahun 2030 dengan kategori sedang dimana kemudian sasaran kota ini diturunkan menjadi tujuan Perangkat Daerah.

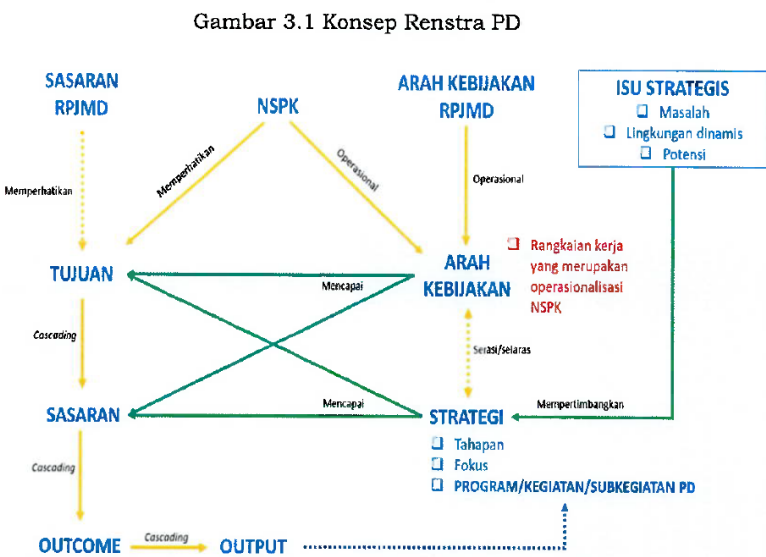
Tujuan Perangkat Daerah ini dimaksudkan bahwa Masyarakat Kota Pontianak memiliki rasa aman terhadap ancaman bencana yang ada. Ancaman bencana dapat dikurangi atau dicegah, Pemerintah dan Masyarakat Kota Pontianak memiliki kapasitas ketangguhan menghadapi bencana sehingga kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana dapat diminimalkan.

Sementara sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat di capai, dan dalam frame waktu pencapaian. Sasaran merupakan gambaran tujuan Perangkat Daerah yang akan diwujudkan.

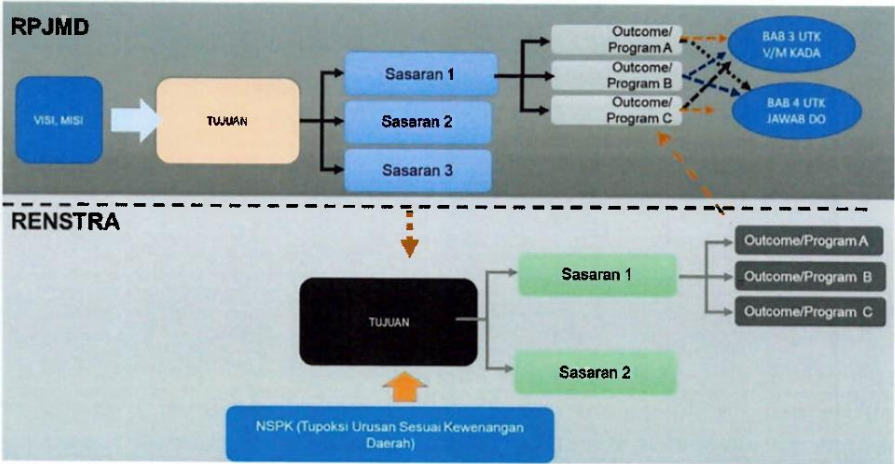
Berdasarkan Tujuan BPBD Kota Pontianak dan Indikator Kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025-2029, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menetapkan 2 sasaran strategis yaitu :

- 1. **“Meningkatnya pencegahan dan mitigasi bencana dan kebakaran”** sasaran ini diukur dengan indikator **“Persentase fasilitasi penanganan pra bencana dan kebakaran”**
- 2. **“Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan kebakaran”** sasaran ini diukur dengan indikator **“Persentase Penyelamatan dan Evakuasi kejadian bencana dan kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)”**

Untuk lebih jelas mengenai keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator serta target capaian Renstra Tahun 2025-2029 dapat diliat dari tabel dibawah ini :



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel III.3
Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BPBD Kota Pontianak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
- Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0.55	0.55	0.60	0.63	0.66	0.69	0.70	
		Meningkatnya pencegahan dan mitigasi bencana dan kebakaran	Persentase fasilitasi penanganan pra bencana dan kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan kebakaran	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi kejadian bencana dan kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	100	100	100	100	100	100	100	

III.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Pontianak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya BPBD Kota Pontianak mengambil strategi penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Sadar Bencana di Wilayah Kota Pontianak melalui Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan bagi masyarakat terutama di daerah rawan bencana
 2. Meningkatkan Penanggulangan Bencana dengan Mengoptimalkan Kapasitas Petugas dan Peningkatan Sarana Prasarana
 3. Meningkatkan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan Mengoptimalkan Kapasitas Petugas DAMKAR dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Non Kebakaran
- Dengan Pelaksanaan Penahapan Renstra terkait bencana sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel III.4
Penahapan Renstra BPBD Kota Pontianak

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inisiasi regulasi resiliensi terhadap bencana,	Percapatan implementasi resiliensi terhadap bencana	Pengembangan iresiliensi terhadap bencana	Pemantapan resiliensi terhadap bencana	Penguatan resiliensi terhadap bencana

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelas penentuan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan di Kota Pontianak berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.5
Arah Kebijakan Bencana di Kota Pontianak

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD		Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2026	Inisiasi regulasi pembangunan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana, transportasi publik dan energi baru terbarukan serta infrastuktur regional	1. Pemberdayaan masyarakat / peningkatan ketangguhan bencana di kawasan-kasawan rawan bencana	
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2027	Percepatan implementasi infrastruktur hijau, aglomerasi ekonomi, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik serta energi baru terbarukan	2. Peningkatan layanan pemerintahan dalam penyebaran informasi, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2028	Pengembangan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik serta energi baru terbarukan	3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana	
	4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2029	Pemantapan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik serta energi baru terbarukan	4. Peningkatan kolaborasi multisektoral dalam penanganan risiko bencana dan perubahan iklim	
		2030	Penguatan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik serta energi baru terbarukan	5. Peningkatan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan	

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagian-bagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan yang berkelanjutan (UNISDR). Salah satu yang perlu ditekankan adalah pengarusutamaan kewaspadaan terhadap bencana dalam perencanaan dan pembangunan Kota Pontianak.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

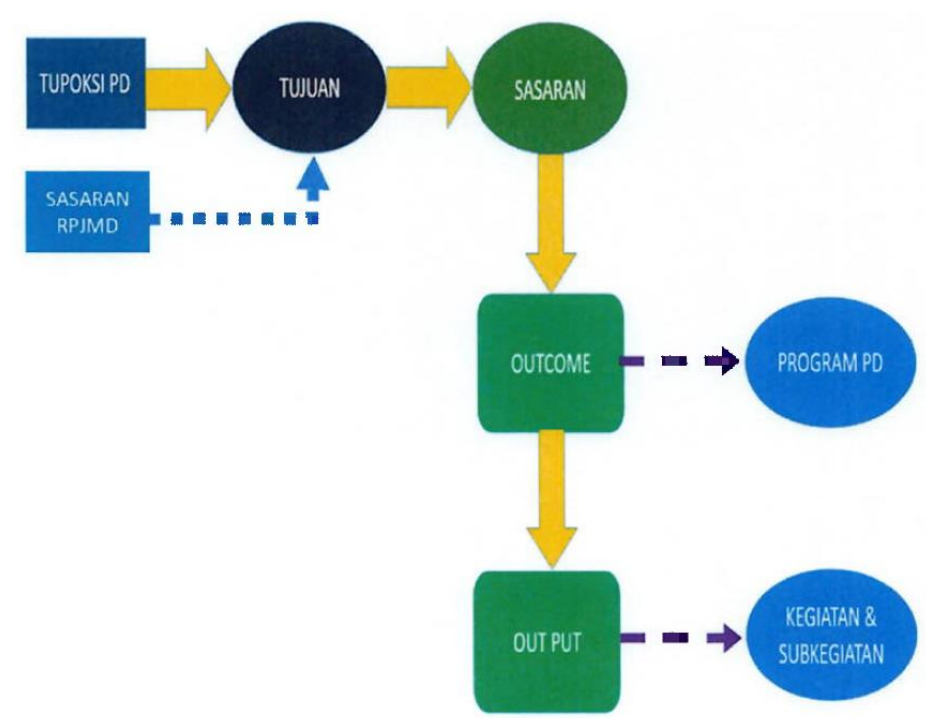
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 didasarkan pada suatu kerangka kerja yang logis, sistematis dan berorientasi pada hasil sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini :

Gambar IV.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Kerangka ini berfungsi sebagai benang merah yang memastikan adanya keselarasan antara tugas yang diemban dengan dampak yang ingin dicapai bagi pembangunan Kota Pontianak.

Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pontianak bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya Pengurangan Indeks Risiko Bencana Pontianak dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Pontianak sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Pontianak 2025-2029.

Untuk mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah BPBD Kota Pontianak, maka BPBD Kota Pontianak menetapkan 2 Program Utama yang terdiri dari 7 Pelayanan Utama urusan kebencanaan dan urusan kebakaran dan 1 Program Pendukung/Rutin. Penetapan program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standard

Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yang telah diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini telah memuat Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dalam rangka mengakomodir perpindahan Bidang Pemadam Kebakaran dari Satpol PP ke BPBD Kota Pontianak. Adapun penjelasan terhadap Program Utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

Program ini memiliki 4 kegiatan/pelayanan sebagai berikut:

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah rawan bencana sehingga akan menumbuhkan sikap dan perilaku budaya sadar bencana. Kegiatan ini memuat dua sub kegiatan yaitu penyusunan kajian resiko bencana dan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

2) Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana

Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini bertujuan untuk melakukan upaya upaya pencegahan sehingga bencana dapat diminimalkan serta memberikan upaya kesiapsiagaan kepada masyarakat, sehingga pemerintah, lembaga masyarakat dan masyarakat memiliki kemampuan bersiap diri menghadapi ancaman bencana yang akan datang, sehingga korban jiwa dan kerugian material dapat ditekan. Diharapkan peristiwa alam yang terjadi tidak menjadi bencana kemanusiaan.

3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dimaksudkan memberikan pelayanan penanganan tanggap darurat saat terjadi bencana sehingga kejadian bencana tidak meluas dan membesar. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pertolongan dan evakuasi kepada korban bencana yang memerlukan.

4) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana bertujuan untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana agar seluruh kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini memiliki 3 kegiatan/pelayanan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman ,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyusunan dokumen NSPM, dokumen Kajian RISPK, kesiapsiagaan personel melalui peningkatan kompetensi dan pembinaan, hingga tindakan cepat saat kejadian. Penanganan khusus terhadap bahan B3 juga menjadi fokus utama guna mencegah dampak lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Kegiatan ini mencakup pemeriksaan berkala terhadap sistem deteksi dini, alat pemadam api ringan (APAR), hidran, alarm kebakaran, dan sistem sprinkler, baik di gedung pemerintahan, fasilitas publik, maupun bangunan komersial. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh peralatan berfungsi optimal saat dibutuhkan.

- 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, dan dukungan sarana dan prasarana untuk masyarakat/relawan damkar. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran di lingkungan masing-masing.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan,s sasaran dan program (*Out Come*) dan Kegiatan (*Output*), target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPBD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
- Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana				Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Indeks)		

				Meningkatnya pencegahan dan mitigasi bencana dan kebakaran			Persentase fasilitasi penanganan pra bencana dan kebakaran (%)		
				Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

					Persentase kejadian bencana yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana perjenis ancaman bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	

					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelayanan tanggap darurat bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	

					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan an bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	

				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
				Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Penanganan Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngn Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
				Tersedianya peralatan proteksi kebakaran dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	

			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan kebakaran		Persentase Penyelamatan dan Evakuasi kejadian bencana dan kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)		
		Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya layanan penanggulang an bencana			Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Persentase kejadian bencana yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana perjenis ancaman bencana			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		

					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelayanan tanggap darurat bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan an bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penanganan Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Meningkatnya pelayanan pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	

					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
				Tersedianya peralatan proteksi kebakaran dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	

Tabel IV.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.424.537.252		9.413.981.152		9.673.339.845		9.952.150.439		10.063.661.828		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.323.739.802		7.159.171.152		7.047.065.252		7.107.065.252		6.938.855.252		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	7.323.739.802	100	7.159.171.152	100	7.047.065.252	100	7.107.065.252	100	6.938.855.252	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		87.500.000		62.500.000		87.500.000		87.500.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	87.500.000	1	62.500.000	1	87.500.000	1	87.500.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		0		1		1			

	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0		5		5		5		5			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	2.500.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	3	5.000.000		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	10	3.000.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5	3.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		

1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		25.000.000		0		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.636.545.252		5.658.365.252		5.658.365.252		5.658.365.252		5.470.155.252		
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	5.636.545.252	12	5.658.365.252	12	5.658.365.252	12	5.658.365.252	12	5.470.155.252		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	59		59		59		59		59			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.455.865.252		5.455.865.252		5.455.865.252		5.455.865.252		5.267.655.252		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	59	5.455.865.252	59	5.455.865.252	59	5.455.865.252	59	5.455.865.252	59	5.267.655.252		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				177.680.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	177.680.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5	1.000.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	48	2.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10	6.000.000	10	12.500.000	10	12.500.000	10	12.500.000	10	12.500.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10	6.000.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				143.669.000		198.700.000		198.700.000		198.700.000		198.700.000		
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	3	143.669.000	5	198.700.000	5	198.700.000	5	198.700.000	5	198.700.000		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		18		18		18		18			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2		3		3		3		3			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				98.450.000		106.200.000		106.200.000		106.200.000		106.200.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2	98.450.000	3	106.200.000	3	106.200.000	3	106.200.000	3	106.200.000		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.219.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	3	45.219.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				354.500.000		390.000.000		390.000.000		415.000.000		440.000.000		
Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	24	354.500.000	36	390.000.000	36	390.000.000	36	415.000.000	36	440.000.000		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	5.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	48.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		

1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	45.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	24	6.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				542.500.000		90.000.000		35.000.000		55.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	542.500.000	4	90.000.000	2	35.000.000	5	55.000.000	5	50.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4		4		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0				0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				440.000.000		0		0		0		0		

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	440.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	50.000.000	4	50.000.000	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.500.000		40.000.000		35.000.000		55.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	52.500.000	4	40.000.000	2	35.000.000	5	55.000.000	5	50.000.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.714.480		235.000.000		235.000.000		235.000.000		235.000.000		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	183.714.480	12	235.000.000	12	235.000.000	12	235.000.000	12	235.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	80.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	6.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				97.714.480		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	97.714.480	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				441.811.070		487.105.900		455.000.000		445.000.000		445.000.000		
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	16	441.811.070	16	487.105.900	16	455.000.000	16	445.000.000	16	445.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	55		55		55		55		55			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		1		1		1		1			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				340.940.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	16	340.940.000	16	300.000.000	16	300.000.000	16	300.000.000	16	300.000.000		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.330.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	55	45.330.000	55	50.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.541.070		45.000.000		60.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	55.541.070	1	45.000.000	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		47.105.900		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	47.105.900	0	0	0	0	0	0		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.408.978.450		1.304.810.000		1.861.274.593		1.454.425.000		1.530.925.000		
Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	1.408.978.450	100	1.304.810.000	100	1.861.274.593	100	1.454.425.000	100	1.530.925.000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Persentase kejadian bencana yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	100	100		100		100		100		100			

1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				36.395.600		34.425.000		539.425.000		44.425.000		49.425.000		
Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana perjenis ancaman bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	36.395.600	0	34.425.000	1	539.425.000	0	44.425.000	0	49.425.000		
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	250	100		100		100		100		100			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				36.395.600		34.425.000		39.425.000		44.425.000		49.425.000		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	250	100	36.395.600	100	34.425.000	100	39.425.000	100	44.425.000	100	49.425.000		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0		0		500.000.000		0		0		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				365.686.600		350.385.000		464.385.000		440.000.000		466.500.000		
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	365.686.600	0	350.385.000	1	464.385.000	0	440.000.000	0	466.500.000		
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	75	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	200	100		100		100		150		150			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1	1		5		5		5		5			
	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	40	25		30		30		30		30			
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	3	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				50.000.000		65.000.000		65.000.000		150.000.000		100.000.000		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	75	10	50.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	10	150.000.000	10	100.000.000		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				40.305.600		35.885.000		40.885.000		65.000.000		80.000.000		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	200	100	40.305.600	100	35.885.000	100	40.885.000	150	65.000.000	150	80.000.000		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				50.394.000		43.500.000		48.500.000		65.000.000		90.000.000		

Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	3	1	50.394.000	1	43.500.000	1	48.500.000	1	65.000.000	1	90.000.000		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				61.165.000		43.500.000		48.500.000		65.000.000		75.000.000		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	40	25	61.165.000	30	43.500.000	30	48.500.000	30	65.000.000	30	75.000.000		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				120.000.000		125.000.000		16.500.000		25.000.000		26.500.000		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	120.000.000	1	125.000.000	1	16.500.000	1	25.000.000	1	26.500.000		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000		7.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	1	5.000.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		200.000.000		0		0		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				38.822.000		30.000.000		35.000.000		60.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1	1	38.822.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	60.000.000	5	85.000.000		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.006.896.250		795.000.000		772.464.593		945.000.000		985.000.000		

Meningkatnya pelayanan tanggap darurat bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0	1.006.896.250	25	795.000.000	25	772.464.593	25	945.000.000	25	985.000.000		
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	275	200		200		200		200		200			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	200	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				393.732.500		250.000.000		250.464.593		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	393.732.500	1	250.000.000	1	250.464.593	1	350.000.000	1	350.000.000		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				488.112.750		400.000.000		377.000.000		400.000.000		425.000.000		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	200	100	488.112.750	100	400.000.000	100	377.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota				0		25.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0	0	25	25.000.000	25	25.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				115.801.000		110.000.000		110.000.000		135.000.000		150.000.000		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	275	200	115.801.000	200	110.000.000	200	110.000.000	200	135.000.000	200	150.000.000		

1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				9.250.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	9.250.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				0		125.000.000		85.000.000		25.000.000		30.000.000		
Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0	0	1	125.000.000		85.000.000		25.000.000		30.000.000		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0					1							
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0					1							
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	0		1									
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		0		0		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0		0		0	1	10.000.000		0		0		
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		50.000.000		0		0		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0		0		0	1	50.000.000		0		0		
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0		50.000.000		0		0		0		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000		0		0		0		

1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				0		50.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	0	0	1	50.000.000		0		0		0		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000		
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				691.819.000		950.000.000		765.000.000		1.390.660.187		1.593.881.576		
Meningkatnya Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran (%)	100	100	691.819.000	100	950.000.000	100	765.000.000	100	1.390.660.187	100	1.593.881.576	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100		100		100		100		100			
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				490.750.000		620.000.000		480.000.000		1.090.000.000		1.263.881.576		
Meningkatnya pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	490.750.000	29	620.000.000	29	480.000.000	29	1.090.000.000	29	1.263.881.576		

	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	1		5		3		5		10			
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		100		100		100		100			
	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12		12		12		12		12			

	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	2		10		10		20		20			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				178.800.000		175.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	178.800.000	12	175.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				20.000.000		20.000.000		25.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		20.000.000		15.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				4.950.000		25.000.000		15.000.000		50.000.000		65.000.000		

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	1	4.950.000	1	25.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				0		50.000.000		30.000.000		75.000.000		85.000.000		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	1	0	5	50.000.000	3	30.000.000	5	75.000.000	10	85.000.000		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				0		50.000.000		25.000.000		50.000.000		75.000.000		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	0	29	50.000.000	29	25.000.000	29	50.000.000	29	75.000.000		
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				0		50.000.000		30.000.000		65.000.000		85.000.000		
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	0	0	0	1	50.000.000	1	30.000.000	1	65.000.000	1	85.000.000		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				250.000.000		0		0		50.000.000		0		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1	250.000.000	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0		
1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran				0		20.000.000		20.000.000		50.000.000		65.000.000		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran (Dokumen)	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000		
1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran				0		60.000.000		25.000.000		50.000.000		65.000.000		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	0	0	0	1	60.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000		

1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				27.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		148.881.576		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	2	27.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000	20	148.881.576		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0		35.000.000		35.000.000		100.000.000		150.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				0		50.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	100	50.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				5.000.000		125.000.000		100.000.000		125.660.187		145.000.000		
Tersedianya peralatan proteksi kebakaran dalam kondisi baik	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	1	5.000.000	1	125.000.000	1	100.000.000	1	125.660.187	1	145.000.000		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0		75.000.000		50.000.000		75.660.187		95.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0	0	0	1	75.000.000	1	50.000.000	1	75.660.187	1	95.000.000		
1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	1	5.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				196.069.000		205.000.000		185.000.000		175.000.000		185.000.000		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	100	196.069.000	100	205.000.000	100	185.000.000	100	175.000.000	100	185.000.000		
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0		29		29		29		29			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				58.569.000		80.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	100	58.569.000	100	80.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	0	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000		
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				137.500.000		75.000.000		75.000.000		65.000.000		75.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	0	1	137.500.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000		

Rencana Program Perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah selaras dnegan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Rencana ini mencakup berbagai program prioritas yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, tantangan pembangunan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara sistematis. Diatas juga telah dijabarkan Program, Kegiatan hingga Sub kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kota Pontianak beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target kinerja. Adapun daftar sub kegiatan prioritas dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
			1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
			1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
			1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	

IV.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Wajib Pelanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban

Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis

hasil. Dalam konteks pembangunan daerah, kinerja pemerintahan dievaluasi berdasarkan RPJMD sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai dasar untuk pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk menetapkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD. Sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BPBD Kota Pontianak telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kota Pontianak lima tahun mendatang dalam penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke 3 Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Pontianak sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III, Tujuan Utama BPBD adalah “**Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana**”, dengan Indikator Kinerja Utamanya : “**Indeks kapasitas Daerah**”. untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas maka BPBD Kota Pontianak menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu: “

Tabel IV.5

Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
2.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,55	0,6	0,63	0,66	0,69	0,7	
3.	Persentase fasilitasi penanganan pra bencana dan kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi kejadian bencana dan kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)	%	100	100	100	100	100	100	100	

Selain adanya penetapan indikator kinerja utama terdapat juga penetapan Indikator Kinerja Daerah. Indikator kinerja daerah merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan yang berbasis kinerja. Indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai keberhasilan pencapaian daerah yang didukung oleh kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebigain besar indikator ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengacu pada ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, perangkat daerah dapat menilai efektivitas dan efisiensi berbagai program serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan selaras dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian daerah serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Adapun Indikator Kinerja Kunci terkait Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6
Indikator Kinerja Kunci BPBD Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Orang	474074	478289	480799	483379	486038	488773	491584	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Orang	951	500	500	500	500	500	500	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Orang	243	250	250	250	250	250	250	
5.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	positif	Menit	7.92	10	10	10	10	10	10	

Seperti yang telah dijelaskan penyusunan Program dan Kegiatan di dalam Dokumen RENSTRA ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, tantangan pembangunan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut BPBD Kota Pontianak telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENSTRA yang dilaksanakan pada 15 April 2025 dengan hasil rekomendasi dan saran yang terlampir dalam Berita Acara sebagai berikut :

Tabel IV.7
Lampiran V Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah BPBD Kota Pontianak Nomor : BA/93.2/BPBD/2025 Tanggal 15 April 2025

No	Saran/Rekomendasi
1.	Kebakaran Lahan merupakan kejadian yang terjadi setiap tahun di Kota Pontianak. Baik kebakaran lahan itu terjadi di dalam Kota Pontianak maupun di sekitar wilayah Kota Pontianak, asapnya tetap berdampak untuk warga Kota Pontianak dalam jangka panjang. Sehingga baiknya

	ada sinergitas dengan Kubu Raya karna tidak jarang asap Karhulta dari Kubu Raya juga berdampak ke Pontianak.
2.	BPBD harus menyusun dokumen RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) hal ni penting agar dapat menjadi standar bangunan dan gedung di Kota Pontianak dalam menerapkan sistem pencegahan kebakaran di bangunan/gedung di Kota Pontianak.
3.	Saran agar dapat diberikan insentif untuk kelurahan-kelurahan yang mendeklarasikan diri sebagai kelurahan tangguh agar ada stimulan bagi masyarakat untuk turut serta meningkatkan kapasitas kota Pontianak dalam menghadapi bencana.
4.	Perlu dukungan dari BPBD sebagai <i>leading sector</i> penanggulangan bencana di Kota Pontianak kepada yayasan-yayasan dan forum-forum pengurangan risiko bencana yang ada dikelurahan. Dengan bergabungnya DAMKAR di bawah BPBD, mulai tahun 2026 BPBD dapat memberikan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada yayasan legal yang mengajukan usulan/proposal dalam rangka mendukung mitigasi bencana kebakaran bangunan maupun kebakaran lahan sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama menanggulangi bencana di Kota Pontianak.
5.	Menurut data 10 tahun (2009-2019) kejadian bencana di Kalimantan Barat, Banjir menjadi penyumbang terbesar dengan 48,64% dan kebakaran lahan hanya 22,96% diikuti Angin Puting Beliung 21,15%. Selain itu Tanah Longsor, Kekeringan dan Gelombang Abrasi hanya 6-7%. Namun untuk Kota Pontianak 3 bencana utama yaitu Angin Puting Beling dengan kategori kerentanan sedang dan potensi kerugian yang tinggi umumnya terjadi di Pontianak Barat dan Timur, Kebakaran hutan dan lahan maupun bangunan sering terjadi di Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan dan Pontianak Utara dengan kerentanan dan potensi kerugian yang rendah. Selanjutnya Banjir ini umum terjadi di Pontianak Selatan dan Tenggara dengan intensitas dan frekuensi yang cukup tinggi di 2024 dan kerentanan dan potensi kerugian rendah. 3 bencana ini penyebab utamanya adalah Cuaca Ekstrem. Sehingga tidak hanya karhutla tapi Kota Pontianak harus lebih <i>concern</i> untuk menyiapkan strategi penanganan banjir ataupun genangan di Kota Pontianak.

BAB V

PENUTUP

Arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan Pontianak di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, sepenuhnya diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2025-2029 dengan penjabaran isu strategis, strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator, target kinerja dan pendanaan. Landasan penyusunannya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk mencapai tujuan pembangunan Pontianak bidang Penanggulangan Bencana bagi pejabat eselon II, III, staf dan seluruh mitra kerja BPBD Kota Pontianak.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan, namun BPBD Kota Pontianak telah memiliki arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam hal penanggulangan bencana. Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini.

Demikian RENSTRA BPBD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya serta dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang konsisten, sinergis dan terarah sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO